



DOI: <https://doi.org/10.38035/jgsp.v4i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pengaruh Digital Leadership Terhadap Digital Government Performance dengan Mediasi Public Services Information System pada Pemerintah Daerah

Baso Saleh¹, Vanessa Gaffar², Lili Adi Wibowo³, Puspo Dewi Dirgantari⁴

¹Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia, baso.saleh@upi.edu

²Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia, vanessa@upi.edu

³Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia, liliadiwibowo@upi.edu

⁴Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia, puspodewi@upi.edu

Corresponding Author: vanessa@upi.edu¹

Abstract: Digital transformation in local governments often suffers from decoupling, where high administrative digital maturity scores fail to translate linearly into improved public service delivery and public value creation. This study aims to test an integrative model linking Digital Leadership (DL) to Digital Government Performance (DGP), with Public Services Information Systems (PSIS) serving as a mediating mechanism. Utilizing an explanatory quantitative design, data were collected from 96 key informants (strategic digital governance officials) across 24 regencies/cities in South Sulawesi Province, Indonesia. The structural model was evaluated using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with second-order reflective constructs. Results reveal that DL directly and significantly impacts DGP ($\beta=0.320$, $p=0.001$), exerts a highly dominant effect on PSIS ($\beta=0.739$, $p=0.000$, $f^2=1.201$), and PSIS significantly enhances DGP ($\beta=0.554$, $p=0.000$, $f^2=0.424$). Furthermore, PSIS is empirically proven to act as a partial mediator that amplifies the indirect influence of DL on DGP ($\beta=0.409$, $p=0.000$). Theoretically, this study bridges the literature gap by integrating Dynamic Capabilities Theory and Public Value Theory into a unified public-sector framework. Practically, the findings urge local governments to overcome application siloing and focus on data-driven digital leadership to foster administrative efficiency and inclusive public value creation.

Keyword: Digital Leadership, Public Services Information System, Digital Government Performance, SPBE, Public Value;, PLS-SEM.

Abstrak: Transformasi digital pada pemerintah daerah di Indonesia sering terjatuh pada fenomena *decoupling*, di mana tingginya pencapaian kematangan administratif digital (Indeks SPBE) belum bertransformasi secara linier menjadi peningkatan kinerja pelayanan publik (*public value creation*). Penelitian ini bertujuan untuk menguji model integratif yang menghubungkan *Digital Leadership* (DL) terhadap *Digital Government Performance* (DGP) dengan *Public Services Information System* (PSIS) sebagai variabel pemediasi. Menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori, data dikumpulkan dari 96 *key informants* (pejabat strategis SPBE) di 24 kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan. Evaluasi model dilakukan menggunakan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM)

dengan konstruk bertingkat (*second-order reflective*). Hasil analisis menunjukkan bahwa DL berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap DGP ($\beta = 0.320$, $p = 0.001$), berpengaruh sangat dominan terhadap PSIS ($\beta = 0.739$, $p = 0.000$, $f^2 = 1.201$), dan PSIS berpengaruh signifikan terhadap DGP ($\beta = 0.554$, $p = 0.000$, $f^2 = 0.424$). Lebih lanjut, PSIS terbukti secara empiris bertindak sebagai mediator parsial (*partial mediation*) yang memperkuat dampak DL terhadap DGP ($\beta = 0.409$, $p = 0.000$). Secara teoritis, penelitian ini menyintesis *Dynamic Capabilities Theory* dan *Public Value Theory* untuk menjelaskan mekanisme transformasi digital birokrasi. Secara praktis, temuan ini menyarankan pemerintah daerah untuk menghentikan fragmentasi aplikasi (*siloing*) dan berfokus pada penguatan kepemimpinan digital berbasis data guna mendorong efisiensi dan penciptaan nilai publik yang inklusif.

Kata Kunci: Kepemimpinan Digital, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Kinerja Pemerintah Digital, SPBE, Nilai Publik, PLS-SEM.

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sektor publik telah mengalami pergeseran paradigma dari sekadar adopsi teknologi informasi berbasis instrumen perifer menjadi sebuah imperatif strategis untuk rekayasa ulang tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik (*public service delivery*) (Mergel et al., 2019; Janowski, 2015). Dalam konteks Indonesia, akselerasi rekayasa tata kelola ini didorong secara *top-down* melalui mandat kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna menciptakan efisiensi dan transparansi birokrasi (United Nations, 2022). Namun, implementasi transformasi digital di tingkat pemerintah daerah sering kali terjebak fenomena *decoupling*—baik *policy-practice decoupling* maupun *means-ends decoupling* (Bromley & Powell, 2012; Crusoe et al., 2024)—yang ditandai oleh ketidakselarasan (*mismatch*) mendasar antara tingginya capaian skor indeks kematangan administratif digital dengan realitas kinerja pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat (Norling et al., 2022; Chohan et al., 2020).

Secara spesifik, di Provinsi Sulawesi Selatan—yang mencakup 24 kabupaten/kota—terdapat kesenjangan (*mismatch*) kinerja digital yang kontras dalam konteks implementasi tata kelola berbasis elektronik. Meskipun sejumlah pemerintah daerah telah berhasil meraih predikat Indeks SPBE berkategori "Sangat Baik" atau "Baik" secara administratif-formal, performansi pencapaian normatif tersebut belum bertransformasi secara inklusif dan substantif menjadi *Digital Government Performance* yang berdampak pada tingkat tapak (KemenPANRB, 2023; Twizeyimana & Andersson, 2019). Permasalahan mendasar yang mengemuka mencakup ketimpangan digital antardaerah (*intra-regional digital divide*), fragmentasi sistem informasi (*siloing application effect*), ketidakmampuan interoperabilitas data antar-instansi, serta lemahnya integrasi *Public Services Information System* (PSIS) yang memicu inefisiensi birokrasi dan redundansi anggaran (Lim & Low, 2022; Weerakkody et al., 2016). Kesenjangan empiris (*empirical gap*) ini menegaskan dinamika *the productivity paradox* dalam *e-government*, di mana besarnya investasi pada infrastruktur dan platform digital semata tidak secara otomatis berkonversi menjadi penciptaan nilai publik (*public value creation*) tanpa diakselerasi oleh kapabilitas *Digital Leadership* yang adaptif dan transformatif (Pang et al., 2014; Cordella & Bonina, 2012).

Literatur tata kelola digital (*digital governance*), sejauh ini masih terfragmentasi ke dalam domain yang berdiri sendiri-sendiri (Mergel et al., 2019; Scupola, 2021). Pendekatan berorientasi internal berbasis *Resource-Based View* (RBV) (Barney, 1991) dan *Dynamic Capabilities Theory* (Teece et al., 1997; Eisenhardt & Martin, 2000) berfokus pada

pentingnya penguasaan aset digital internal serta kemampuan orkestrasi sumber daya organisasi dalam merestrukturisasi kompetensi teknologis guna merespons dinamika lingkungan. Sebaliknya, *Public Value Theory* (Moore, 1995; Alford & O'Flynn, 2009) yang berorientasi eksternal menegaskan bahwa ukuran keberhasilan *ultimate* dari organisasi publik terletak pada penciptaan manfaat sosial yang nyata, meningkatkan kepuasan warga negara, efisiensi, transparansi, serta partisipasi publik (*citizen engagement*). *Theoretical gap* mendasar mengemuka karena masih sangat terbatasnya studi empiris yang secara sistematis mengintegrasikan kapabilitas internal (*Dynamic Capabilities*) dengan penciptaan nilai eksternal (*Public Value Theory*) ke dalam satu kerangka kerja struktural yang utuh (Panagiotopoulos et al., 2019; Twizeyimana & Andersson, 2019), khususnya pada konteks tata kelola pemerintah daerah di negara-negara berkembang (*developing economies*) (Heeks, 2023).

Guna menjembatani celah teoritis tersebut, penelitian ini mengusulkan *Public Services Information System* (PSIS) sebagai variabel mediasi strategis (*enabling mechanism*) yang menghubungkan *Digital Leadership* (DL) dengan *Digital Government Performance* (DGP). *Digital Leadership* yang dicirikan oleh visi transformatif, literasi data, kepemimpinan perubahan, dan inovasi kolaboratif, diposisikan sebagai dorongan kapabilitas dinamik (*dynamic capability driver*) yang memobilisasi, mengintegrasikan, dan mengoptimalkan PSIS. PSIS yang andal, efisien, dan terinteroperabilitas pada akhirnya bertindak sebagai kondukt utama dalam mengejawantahkan Visi Kepemimpinan menjadi penciptaan Kinerja Pemerintah Digital yang bernilai publik.

Berdasarkan latar belakang dan urgensi akademis yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh langsung *Digital Leadership* terhadap *Digital Government Performance* pada pemerintah daerah di Sulawesi Selatan, menganalisis pengaruh *Digital Leadership* terhadap efektivitas *Public Services Information System* (PSIS), serta menguji pengaruh PSIS terhadap *Digital Government Performance*. Lebih lanjut, penelitian ini secara khusus bertujuan untuk membuktikan peran mediasi PSIS dalam menjembatani hubungan antara *Digital Leadership* dan *Digital Government Performance*. Melalui pembuktian empiris ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis berupa sintesis integratif antara *Dynamic Capabilities Theory* dan *Public Value Theory*, sekaligus memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan strategis bagi pemerintah daerah dalam mengatasi fenomena *decoupling* digital birokrasi.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada lingkup Pemerintah Daerah di 24 Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif eksplanatori (*explanatory research*) dengan desain *cross-sectional*. Unit analisis dalam penelitian ini adalah instansi pemerintah daerah, sedangkan unit observasi (*key informants*) terdiri dari pejabat strategis yang memiliki kewenangan dan keterlibatan langsung dalam perencanaan, eksekusi, serta evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pelayanan publik berbasis digital di masing-masing kabupaten/kota.

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria inklusi pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator di lingkungan instansi pengelola digitalisasi daerah (seperti Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian) serta unit pelayanan publik kunci. Jumlah total *key informants* yang dijadikan sampel penelitian adalah $N = 96$ responden (terdiri dari 4 pejabat kunci mewakili setiap kabupaten/kota secara proporsional), yang dinilai memiliki kapasitas kognitif dan otoritas informasi yang memadai untuk merepresentasikan kondisi objektif penerapan kepemimpinan digital, sistem informasi, dan kinerja digital di daerahnya.

Seluruh variabel dalam penelitian ini dimodelkan sebagai Konstruk Reflektif Tingkat Dua (*Second-Order Reflective-Reflective Measurement Model*) untuk menangkap kompleksitas multidimensi dari masing-masing fenomena yang diteliti. Pengukuran indikator menggunakan skala Likert 5 poin (1 = Sangat Tidak Setuju hingga 5 = Sangat Setuju).

Tabel 1. Operasionalisasi Konstruk Dan Dimensi Penelitian

Konstruk Utama	Dimensi Spesifik	Kode Dimensi
Digital Leadership (DL)	1. Visionary Leadership	XA
	2. Digital Competency & Literacy	XB
	3. Data-driven Decision Making	XC
	4. Change Leadership	XD
	5. Collaborative Innovation	XE
Public Services Information System (PSIS)	1. System Quality	ZA
	2. Information Quality	ZB
	3. Interoperability	ZC
	4. System Responsiveness	ZD
Digital Government Performance (DGP)	1. Operational Effectiveness	YA
	2. Administrative Efficiency	YB
	3. Service Quality	YC
	4. Public Satisfaction	YD
	5. Transparency & Accountability	YE
	6. Public Participation	YF
	7. Secure Digital Space	YG

- Digital Leadership (DL): Diukur melalui 5 dimensi utama, yaitu Visi Kepemimpinan (*Visionary Leadership*), Kompetensi/Literasi Digital (*Digital Competency*), Pengambilan Keputusan Berbasis Data (*Data-driven Decision*), Kepemimpinan Perubahan (*Change Leadership*), serta Inovasi & Kolaborasi (*Collaborative Innovation*).
- Public Services Information System (PSIS): Diukur melalui 4 dimensi utama, mencakup Kualitas Sistem (*System Quality*), Kualitas Informasi (*Information Quality*), Interoperabilitas (*Interoperability*), dan Responsivitas Sistem (*Responsiveness*).
- Digital Government Performance (DGP): Diukur melalui 7 dimensi dampak publik, yaitu Efektivitas Operasional, Efisiensi Administratif, Kualitas Layanan, Kepuasan Publik, Transparansi, Partisipasi Publik, dan Keamanan Ruang Digital.

Berdasarkan sintesis konseptual dan model hubungan antarvariabel, hipotesis penelitian yang diuji dalam model struktural adalah sebagai berikut:

- H1: *Digital Leadership* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Digital Government Performance* pada pemerintah daerah di Sulawesi Selatan.
- H2: *Digital Leadership* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Public Services Information System*.
- H3: *Public Services Information System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Digital Government Performance*.
- H4: *Public Services Information System* memediasi pengaruh *Digital Leadership* terhadap *Digital Government Performance*.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 4, yang dipilih karena

sangat cocok untuk pengujian model prediktif kompleks dengan struktur konstruk bertingkat (*hierarchical component models/second-order*) serta tidak mensyaratkan asumsi distribusi normal multivariat pada ukuran sampel berukuran kecil hingga sedang ($N = 96$). Prosedur evaluasi model PLS-SEM dilakukan melalui dua tahapan utama mengacu pada Hair et al. (2021), yaitu evaluasi model pengukuran (*outer model evaluation*) yang mencakup pengujian validitas konvergen ($\text{loading} \geq 0.70$, $\text{AVE} \geq 0.50$), reliabilitas konstruk ($\alpha \geq 0.70$, $\text{CR} \geq 0.70$), dan validitas diskriminan ($\text{HTMT} < 0.85$), serta evaluasi model struktural (*inner model evaluation*) dan uji hipotesis yang melibatkan pengukuran koefisien determinasi (R^2), ukuran efek (f^2), dan uji signifikansi melalui prosedur *non-parametric bootstrapping* dengan 5.000 sampel ulang ($t \geq 1.96$, $p < 0.05$).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Evaluasi model pengukuran (*outer model*) dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh konstruk bertingkat (*second-order reflective constructs*) memiliki reliabilitas dan validitas yang memadai.

Tabel 2. Evaluasi Reliabilitas Dan Validitas Konvergen Konstruk (Outer Model)

Konstruk Utama (Second-Order)	Cronbach's Alpha (α)	Composite Reliability (CR)	AVE
Digital Leadership (DL)	0.991	0.992	0.892
Public Services Info System (PSIS)	0.988	0.989	0.882
Digital Government Performance (DGP)	0.960	0.963	0.559

Sumber: Output SmartPLS 4 (2026)

Seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* di atas ambang batas 0.70, serta nilai AVE di atas 0.50, yang membuktikan bahwa seluruh konstruk memenuhi kriteria reliabilitas yang sangat kuat dan validitas konvergen yang sempurna.

Tabel 3. Matriks Validitas Diskriminan (HTMT Ratio)

Konstruk Utama	[1] DL	[2] PSIS	[3] DGP
[1] Digital Leadership (DL)	-		
[2] Public Services Info System (PSIS)	0.746	-	
[3] Digital Government Performance (DGP)	0.748	0.810	-

* Kriteria: Nilai HTMT < 0.85 menunjukkan validitas diskriminan yang baik.

Sumber: Output SmartPLS 4 (2026)

Seluruh nilai ratio HTMT antar-konstruk berada di bawah ambang batas konservatif 0.850, yang mengonfirmasi bahwa validitas diskriminan terbukti terpenuhi.

Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Tabel 4. Nilai Koefisien Determinasi (R^2) dan Ukuran Efek (f^2)

Konstruk Endogen / Jalur Hubungan	R^2 / Nilai f^2	Kategori / Keterangan
PSIS (R^2)	0.546	Moderat (54.6% varians dijelaskan oleh DL)
DGP (R^2)	0.671	Subtansial (67.1% varians dijelaskan oleh DL & PSIS)
DL $\rightarrow$ PSIS (f^2)	1.201	Sangat Besar (<i>Large Effect</i>)
PSIS $\rightarrow$ DGP (f^2)	0.424	Besar (<i>Large Effect</i>)
DL $\rightarrow$ DGP (f^2)	0.141	Sedang (<i>Moderate Effect</i>)

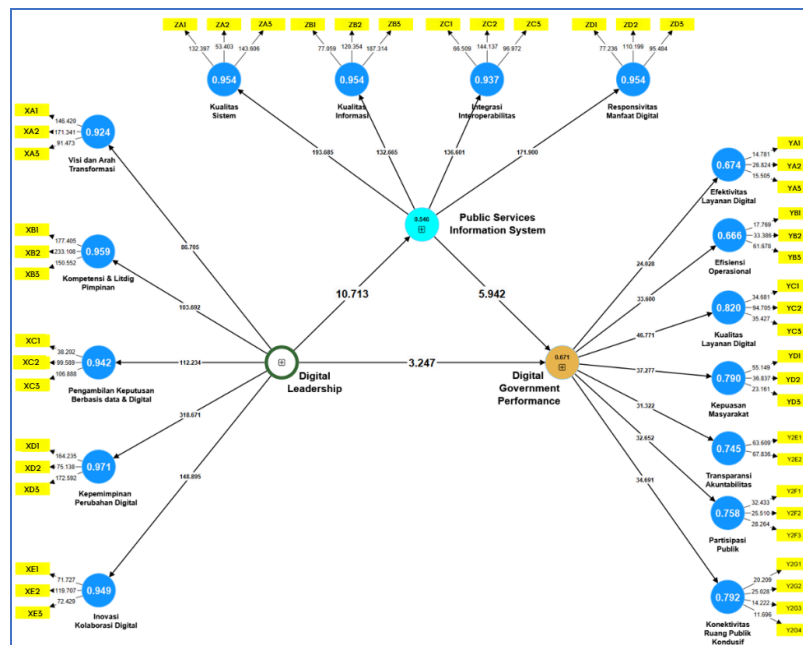
* Kriteria f^2 : 0.02 (Kecil), 0.15 (Sedang), 0.35 (Besar).

Sumber: Output SmartPLS 4 (2026)

Model menunjukkan daya prediktif yang kuat, di mana DL memberikan kontribusi efek yang sangat besar terhadap eksistensi PSIS ($f^2 = 1.201$), dan PSIS memberikan efek yang besar terhadap DGP ($f^2 = 0.424$).

Pengujian Hipotesis (*Direct & Indirect Effects*)

Visualisasi model struktural hasil estimasi *bootstrapping* SmartPLS 4 disajikan pada Gambar 1 berikut:



Sumber: Output SmartPLS 4 (2026)

Gambar 1. Hasil Bootstrapping Model Struktural PLS-SEM

Visualisasi model struktural pada Gambar 1 memperlihatkan secara jelas arah dan kekuatan hubungan antarkonstruk dalam model penelitian. Hasil estimasi koefisien jalur (β), standar deviasi (*STDEV*), nilai *t*-statistik, dan nilai *p* (*p-value*) dirangkum secara rinci pada Tabel 5 dan Tabel 6:

Tabel 5. Hasil Pengujian Hipotesis Jalur Langsung (*Direct Effects*)

Hipotesis	Jalur Hubungan (Path)	Original Sample (β)	Sample Mean (M)	STDEV	t-Statistics	p-Values	Keputusan
H1	DL -> DGP	0.320	0.322	0.098	3.247	0.001	Diterima
H2	DL -> PSIS	0.739	0.742	0.069	10.713	0.000	Diterima
H3	PSIS -> DGP	0.554	0.552	0.093	5.942	0.000	Diterima

Sumber: Output SmartPLS 4 (2026)

Berdasarkan pemaparan pengaruh langsung di atas, langkah selanjutnya adalah menguji peran mediasi *Public Services Information System* (PSIS). Hasil uji *bootstrapping* untuk pengaruh tidak langsung (*specific indirect effect*) disajikan pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis Mediasi (*Specific Indirect Effect*)

Hipotesis	Jalur Mediasi (Indirect Path)	Original Sample (β)	STDEV	t-Statistics	p-Values	Keputusan
H4	DL -> PSIS -> DGP	0.409	0.080	5.113	0.000	Diterima

Sumber: Output SmartPLS 4 (2026)

Seluruh hipotesis (H1–H4) terbukti signifikan ($p < 0.05$). Sifat mediasi PSIS terbukti bersifat Mediation Parsial (*Partial Mediation*), di mana nilai koefisien tidak langsung ($\beta = 0.409$) lebih besar daripada koefisien pengaruh langsung ($\beta = 0.320$).

Pembahasan

Hasil analisis empiris mengonfirmasi bahwa *Digital Leadership* (DL) bertindak sebagai penggerak utama dalam meningkatkan *Digital Government Performance* (DGP) pada pemerintah daerah di Sulawesi Selatan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui *Public Services Information System* (PSIS).

Penerimaan H1 ($\beta = 0.320$, $p = 0.001$) dan H2 ($\beta = 0.739$, $p = 0.000$) membuktikan perspektif *Dynamic Capabilities Theory* bahwa pimpinan digital yang memiliki visi transformatif, literasi data, dan kepemimpinan perubahan mampu meruntuhkan ego sektoral serta mendandani infrastruktur digital daerah. Pengaruh DL terhadap PSIS yang sangat dominan ($f^2 = 1.201$) mengindikasikan bahwa keberadaan sistem informasi pelayanan publik yang berkualitas dan terintegrasi tidak dapat lahir secara spontan tanpa komitmen strategis dari pimpinan birokrasi.

Selanjutnya, penerimaan H3 ($\beta = 0.554$, $p = 0.000$) dan H4 ($\beta = 0.409$, $p = 0.000$) mengonfirmasi peran vital PSIS sebagai *enabling mechanism* yang menghubungkan kapabilitas internal pimpinan dengan luaran penciptaan nilai publik (*Public Value Theory*). Koefisien mediasi parsial yang signifikan memberikan penjelasan logis atas fenomena *decoupling* dan *productivity paradox*: investasi IT dan komitmen pimpinan tidak akan berdampak maksimal pada kepuasan masyarakat jika aplikasi pelayanan publik masih terfragmentasi (*siloing application*). PSIS yang terinteroperabilitas dan responsif menjadi konduit utama yang menyalurkan visi pimpinan menjadi manfaat pelayanan publik yang transparan, efisien, dan inklusif di tingkat tapak.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil membuktikan secara empiris model integratif yang menghubungkan *Digital Leadership* (DL), *Public Services Information System* (PSIS), dan *Digital Government Performance* (DGP) pada 24 pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Seluruh hipotesis terbukti signifikan: DL berpengaruh positif langsung terhadap DGP ($\beta = 0.320$, $p = 0.001$), DL berpengaruh sangat dominan terhadap PSIS ($\beta = 0.739$, $p = 0.000$, $f^2 = 1.201$), dan PSIS berpengaruh signifikan terhadap DGP ($\beta = 0.554$, $p = 0.000$, $f^2 = 0.424$). Lebih jauh, PSIS terbukti secara empiris bertindak sebagai mediator parsial (*partial mediation*) yang memperkuat dampak tidak langsung DL terhadap DGP ($\beta = 0.409$, $p = 0.000$). Secara kontribusi akademis dan praktis, penelitian ini berhasil menjembatani celah literatur (*theoretical gap*) dengan mengejawantahkan sintesis integratif antara *Dynamic Capabilities Theory* dan *Public Value Theory* ke dalam satu kerangka kerja empiris yang utuh pada sektor publik guna mengatasi fenomena *decoupling* digital birokrasi.

Meskipun memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang signifikan, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan metodologis yang perlu dicermati, yaitu penggunaan desain *cross-sectional* yang hanya merekam kondisi variabel pada satu titik waktu tertentu di tengah cepatnya dinamika transformasi digital, batasan cakupan geografis pada 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang memerlukan kehati-hatian dalam menggeneralisasi hasil ke wilayah dengan kematangan digital yang berbeda, serta ketergantungan pada *self-reported perceptual data* dari pejabat kunci (*key informants*) yang berpotensi memunculkan *social desirability bias* atau persepsi subjektif.

Secara praktis, pemerintah daerah disarankan untuk menghentikan fragmentasi sistem (*siloing application*) dengan mengalihkan fokus pada konsolidasi sistem terpadu (PSIS) yang memiliki kapabilitas interoperabilitas data antar-instansi yang tinggi. Selain itu,

Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah perlu merancang program pengembangan kapasitas *digital leadership* yang berfokus pada *digital literacy*, *data-driven decision making*, dan *change management* bagi para pejabat birokrasi guna mengakselerasi pencapaian Indeks SPBE yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik. Untuk penelitian selanjutnya, direkomendasikan penggunaan pendekatan *longitudinal study*, perluasan sampel lintas provinsi/negara berkembang, serta penggabungan data persepsi dengan metrik objektif sekunder seperti Indeks SPBE resmi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

REFERENSI

- Alford, J., & O'Flynn, J. (2009). Making sense of public value: Concepts, critiques and emergent meanings. *International Journal of Public Administration*, 32(3-4), 171–191. <https://doi.org/10.1080/01900690902732731>
- Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120. <https://doi.org/10.1177/014920639101700108>
- Bromley, P., & Powell, W. W. (2012). From compliance to performance: Decoupling and over-compliance in the non-profit sector. *Academy of Management Annals*, 6(1), 483–530. <https://doi.org/10.5465/19416520.2012.684462>
- Chohan, S. R., Hu, G., & Liu, L. (2020). Evaluating e-government maturity models: A public value perspective. *Information Technology for Development*, 26(4), 782–803. <https://doi.org/10.1080/02681102.2020.1751092>
- Cordella, A., & Bonina, C. M. (2012). A public value perspective for ICT enabled public sector reforms. *Government Information Quarterly*, 29(4), 512–520. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.03.004>
- Crusoe, J., Magnusson, J., & Eklund, J. (2024). Digital transformation decoupling: The impact of willful ignorance on public sector digital transformation. *Government Information Quarterly*, 41(3), Article 101958. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2024.101958>
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9–30. <https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748>
- Eisenhardt, K. M., & Martin, J. A. (2000). Dynamic capabilities: What are they? *Strategic Management Journal*, 21(10-11), 1105–1121. [https://doi.org/10.1002/1097-0266\(200010/11\)21:10/11<1105::AID-SMJ133>3.0.CO;2-E](https://doi.org/10.1002/1097-0266(200010/11)21:10/11<1105::AID-SMJ133>3.0.CO;2-E)
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2021). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Heeks, R. (2023). *Information and communication technology for development (ICT4D)*. Routledge.
- Janowski, T. (2015). Implementing Digital Government for better governance and sustainable development. *Government Information Quarterly*, 32(3), S221–S220. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.04.004>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2023). *Laporan hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada pemerintah daerah*. KemenPANRB.
- Lim, C. P., & Low, C. Y. (2022). Overcoming application siloing and data fragmentation in public sector digital transformation. *International Journal of Public Sector Management*, 35(4), 412–430. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-10-2021-0251>
- Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4), Article 101385. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002>
- Moore, M. H. (1995). *Creating public value: Strategic management in government*. Harvard University Press.

- Norling, K., Lindroth, T., Magnusson, J., & Torell, J. (2022). Digital decoupling: A population study of digital transformation strategies in Swedish municipalities. In *Proceedings of the 23rd Annual International Conference on Digital Government Research* (pp. 15–17). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3543434.3543452>
- Panagiotopoulos, P., Klievink, B., & Cordella, A. (2019). Public value creation in digital government. *Government Information Quarterly*, 36(4), Article 101388. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.07.001>
- Pang, M. S., Lee, G., & DeLone, W. H. (2014). Can enterprise information technology improve government performance? An empirical analysis of US federal agencies. *MIS Quarterly*, 38(4), 1021–1045. <https://doi.org/10.25300/MISQ/2014/38.4.04>
- Ringle, C. M., Wende, S., & Becker, J. M. (2022). *SmartPLS 4*. SmartPLS GmbH.
- Sarstedt, M., Hair, J. F., Cheah, J. H., Becker, J. M., & Ringle, C. M. (2019). How to specify, estimate, and validate higher-order constructs in PLS-SEM. *Australasian Marketing Journal*, 27(3), 197–211. <https://doi.org/10.1016/j.ausmj.2019.05.003>
- Schoemaker, P. J., Heaton, S., & Teece, D. (2018). Innovation, dynamic capabilities, and leadership. *California Management Review*, 61(1), 15–42. <https://doi.org/10.1177/0008125618790246>
- Scupola, A. (2021). The role of dynamic capabilities in digital transformation: A literature review. *Journal of Strategy and Management*, 14(4), 438–458. <https://doi.org/10.1108/JSMA-08-2020-0214>
- Sow, M., & Aborampah, A. (2018). Meaning of digital leadership. *European Journal of Business and Management*, 10(11), 133–138.
- Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. *Strategic Management Journal*, 18(7), 509–533. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-0266\(199707\)18:7<509::AID-SMJ882>3.0.CO;2-Z](https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199707)18:7<509::AID-SMJ882>3.0.CO;2-Z)
- Twizeyimana, J. D., & Andersson, A. (2019). The public value of E-Government—A literature review. *Government Information Quarterly*, 36(2), 167–178. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.01.001>
- United Nations. (2022). *UN E-Government survey 2022: The future of digital government*. United Nations Department of Economic and Social Affairs.
- Weerakkody, V., Omar, A., El-Haddadeh, R., & Al-Busaidy, M. (2016). Digitally-enabled service transformation in the public sector: The role of interoperability and collaboration. *Government Information Quarterly*, 33(4), 708–719. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.03.006>